WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 27 Agustus 2026

Kepada
Yth. 1. Para Camat;
2. Para Kepala Bagian;
3. Para Lurah;
Kota Administrasi Jakarta Barat.
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0018/SE/2026

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE KEDUA TAHUN 2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dengan ini disampaikan tata cara pengusulan penghargaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Ruang lingkup
   Ruang lingkup pengusulan penghargaan dalam surat edaran ini adalah **penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya** dan **penghargaan masa kerja**.

2. PNS yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan untuk menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) surat edaran ini.

3. Penyampaian usulan :
   Camat/Kepala Bagian/Lurah mengusulkan PNS untuk mendapatkan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan penghargaan masa kerja ke Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat;

4. Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dengan persyaratan sebagai berikut :
   A. memiliki masa kerja secara terus menerus paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Calon PNS;
   B. penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus;
   C. semua unsur penilaian prestasi kerja/evaluasi kinerja pegawai tahun 2025 paling kurang bernilai baik;

D. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
(Bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, maka penghitungan masa kerja dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah);
E. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
F. bagi PNS yang pernah menjalani cuti di luar tanggungan negara, maka penghitungan masa kerja dimulai sejak berakhirnya cuti di luar tanggungan negara.

5. Persyaratan dan kelengkapan dokumen

A. Usulan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya, dengan kelengkapan dokumen berikut :
1) *scan* Asli Daftar Riwayat Hidup (ditandatangani oleh PNS bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung dan dibubuhi stempel Perangkat Daerah/UKPD) dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini). Contoh Daftar Riwayat Hidup Satyalancana Karya Satya dapat diunduh pada :
https://bit.ly/DRH_USULANSLKS_JB
2) *scan fotocopy* SK CPNS yang telah dilegalisir;
3) *scan fotocopy* SK kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
4) *scan fotocopy* SK pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
5) *scan fotocopy* legalisir Keppres Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang terakhir diterima pegawai bersangkutan (bagi yang diusulkan penghargaan XX (20 tahun) atau XXX (30 tahun)); dan
6) *scan* surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dengan ketentuan ;
a. Penandatangan :
- Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana yang bertugas di Setko Administrasi Jakarta Barat ditandatangani oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana yang bertugas di Kecamatan/Kelurahan ditandatangani oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. Format :
sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini,
c. Contoh Surat Pernyataan Tidak Pernah Dikenakan Hukuman Disiplin untuk penghargaan Satyalancana Karya Satya dapat diunduh pada :
https://bit.ly/SUKET_TIDAKKENAHUKDIS_SLKS

Hasil *scan* dokumen dibuat dalam satu file dalam urutan nomor 1) s.d 6) dengan format pdf. maksimal 5MB (megabyte).

B. Usulan penghargaan masa kerja, dengan kelengkapan dokumen berikut :
1) *scan fotocopy* SK CPNS yang telah dilegalisir;
2) *scan fotocopy* SK PNS yang telah dilegalisir;
3) *scan fotocopy* SK perpindahan (bagi PNS pindahan dari instansi lain);
4) *scan fotocopy* SK kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
5) *scan fotocopy* SK pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
6) *scan fotocopy* penilaian prestasi kerja/dokumen evaluasi kinerja pegawai tahun 2025; dan
7) *scan* surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dengan ketentuan ;
a. Penandatangan :
- Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana yang bertugas di Setko Administrasi Jakarta Barat ditandatangani oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana yang bertugas di Kecamatan/Kelurahan ditandatangani oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. Format :
sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini.

c. Contoh Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin untuk penghargaan Satyalancana Karya Satya dapat diunduh pada :
https://bit.ly/SUKET_TIDAKKENAHUKDIS_MASAKERJA

Hasil *scan* dokumen dibuat dalam satu file dalam urutan nomor 1) s.d 7) dengan format pdf. maksimal 5MB (megabyte).

6. Waktu Penyampaian Usulan
Usulan disampaikan paling lambat tanggal 20 September 2026.

7. Daftar Nama Usulan
Daftar Nama PNS yang dapat diusulkan untuk menerima penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan/atau penghargaan masa kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini.

8. Lain-lain
1) Kelengkapan dokumen sesuai persyaratan dikirimkan melalui email penghargaanbagiankkppkotajb@gmail.com
2) Pengusulan penghargaan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
3) **Wajib mengunggah dokumen dalam satu file yang tersusun sesuai ketentuan.**

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Iin Mutmainnah
NIP 197103271991012001

Tembusan :
1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Surat Edaran Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0018/SE/2026
Tanggal 27 Agustus 2026

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2.	Tempat, Tanggal Lahir	
3.	NIP	
4.	Pendidikan Terakhir	
5.	Pangkat dan Gol. Ruang Terakhir/TMT	
6.	Nomor SK CPNS/TMT	
7.	Jabatan Terakhir/TMT	
8.	Jenis Kelamin	
9.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (Nomor dan tanggal Keppres) (*jika ada*)	
10.	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, dan TMT dijatuhi hukuman s.d. selesai) (*jika ada*)	
11.	CLTN (Nomor, dan TMT CLTN s.d. selesai) (*jika ada*)	

Jabatan atasan langsung,

(TTD dan stempel)

Nama atasan langusng
NIP xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ditetapkan di Jakarta, ... 20.....

(TTD)

Nama Pegawai
NIP xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Iin Mutmainnah
NIP 197103271991012001

Lampiran II : Surat Edaran Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0018/SE/2026
Tanggal 27 Agustus 2026

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIKENAKAN HUKUMAN DISIPLIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa
Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin, baik tingkat sedang maupun tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Jakarta, ... 2026
Kepala Perangkat Daerah / UKPD

(TTD dan stempel)

Nama
NIP

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Iin Mutmainnah
NIP 197103271991012001

Lampiran III : Surat Edaran Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0018/SE/2026
Tanggal 27 Agustus 2026

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa
Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sampai saat ini yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, baik tingkat sedang maupun tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk pemberian penghargaan.

Jakarta, ... 2026
Kepala Perangkat Daerah / UKPD

(TTD dan stempel)

Nama
NIP

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Iin Mutmainnah
NIP 197103271991012001

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Nomor e-0018/SE/2026 Tentang Tata Cara Pengusulan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Kedua Tahun 2026, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Lampiran IV Surat Edaran Walikota tersebut tidak dapat diunggah (diupload) pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jakarta Barat karena di dalam lampirannya memuat data pribadi berupa Nomor Register Kepegawaian (NRK) yang bersifat rahasia dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagai pengganti unggahan pada JDIH, salinan Surat Edaran beserta lampirannya telah disediakan dalam bentuk:

a. soft copy (berkas elektronik); dan
b. hard copy (berkas cetak),

yang dapat diakses dan diperoleh melalui Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.